

POLITIK SEBAGAI JALAN PRAKTIK TASAWUF: TELAAH TERHADAP KONSEP ASFAR AL-ARBA'AH MULLA SHADRA

Andi Muhammad Ikbal Salam

Universitas Sulawesi Barat)

E-mail: a.mikbalsalam@unsulbar.ac.id

Nizar

Universitas Sulawesi Barat

E-mail: nizar@unsulbar.ac.id

Asriani

Universitas Sulawesi Barat

E-mail: asriani@unsulbar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik sebagai jalan praktik tasawuf berdasarkan konsep *asfar al-arba'ah* Mulla Shadra. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yakni dengan mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis tentang konsep *asfar al-arba'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep empat perjalanan (*asfar al-arba'ah*) Mulla Shadra terdiri atas: perjalanan dari makhluk menuju Tuhan ; *kedua*, perjalanan di dalam [asma-asma] Tuhan bersama Tuhan; *ketiga*, perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan; *keempat*, perjalanan di dalam makhluk bersama Tuhan. Mulla Shadra menempatkan perjalanan ruhani keempat sebagai perjalanan politik. Substansi politik dimaknai sebagai upaya sadar menyingkap realitas dan regulasi yang mendominasi aktivitas sadar dan menggiring kehidupan kolektif manusia kepada takdir yang diinginkan. Pandangan ini meniscayakan kemestian regulasi bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan yang harmoni melalui ketundukan pada Tuhan. Tunduk pada Tuhan berarti tunduk pada aturan dan tradisi sunnah, termasuk keniscayaan kenabian. Karenanya Mulla Shadra memahami bahwa tujuan misi dari para nabi adalah sebagai perbaikan agama dan dunia manusia melalui manajemen filosofis dan politik.

Kata Kunci: Mulla Shadra, Tasawuf, Politik, Asfar al-Arba'ah

Abstract: This research aims to find out politics as a way of practicing Sufism based on the concept of *asfar al-arba'ah* Mulla Shadra. The research method used is qualitative research with a literature study approach, namely by examining or interpreting written material about the concept of *asfar al-arba'ah*. The results showed that the concept of four journeys (*asfar al-arba'ah*) Mulla Shadra consists of: the journey from being to God; second, the journey in the [names of] God with God; third, the journey from God to being with God; fourth, the journey in being with God. Mulla Shadra places the fourth spiritual journey as a political journey. The substance of politics is understood as a conscious effort to uncover the realities and regulations that dominate conscious activity and lead human collective life to the desired destiny. This view necessitates the necessity of regulation for society to sustain a harmonious life through submission to God. Submission to God means submission to the rules and traditions of the sunnah, including prophetic inevitability. Therefore, Mulla Shadra understands that the purpose of the mission of the prophets is the improvement of religion and the human world through philosophical and political management.

Keywords: Mulla Shadra, Sufism, Politics, Asfar al-Arba'ah

Pendahuluan

Empat perjalanan Ruhani (*Asfar al-Arba'ah*)¹ adalah merupakan salah satu konsep orisinal yang di sodorkan oleh Mulla Shadra di antara berbagai gagasan filosofis yang dia konstruksi, Saifan Nur memberi gambaran dalam karyanya seperti kemendasaran eksistensi (*ashlaha alwujud*), gradasi wujud (*tashqiq al-wujud*), gerak substansi (*harakah al-jauhariyah*) adalah konsep yang menarik untuk ditelusuri di tengah realitas perpolitikan yang cenderung bebas nilai dan mengabaikan spirit ruhani keagamaan dewasa ini.² Selanjutnya yang menjadi dasar masalah adalah paradigma politik Barat yang kerap kali dijadikan rujukan dalam praktek politik, sehingga menggerus nilai langit (*transenden*).

Selain dua hal tersebut di atas yang menjadi dasar masalah, sehingga peneliti mengangkat judul tersebut adalah acap kali dalam lembaga pendidikan juga sebagian literatur yang ada dewasa ini menganggap pemikiran Islam seolah hilang dalam peredaran waktu. Menganggap filsafat dewasa ini didominasi oleh filsafat Barat, termasuk pemikiran politik Islam yang kurang menarik perhatian para akademisi dan praktisi, karena dinamika intelektual yang terjadi di belahan dunia Barat tidak jarang dijadikan sebagai pusat studi. Gambaran tentang dunia Barat yang memasuki babak baru dalam dunia filsafat melalui munculnya seorang Rene Descartes melalui Proposisinya yang populer "*Cogito Ergo Sum*" (Aku bepikir maka aku ada), dari sini Rane Descartes kemudian membangun filsafatnya dan menjadi pijakan bagi filsafat Barat dan generasi selanjutnya, kemudian dikenal sebagai bapak filsafat modern.³

Perspektif tersebut mengangap masa Renaissance filsafat Barat lahir setelah filsafat Islam gagal dalam mempertahankan eksistensinya. Setelah mendapatkan serangan dari ilmuan internal Islam maupun eksternal, atau berakhir dengan kematian Ibnu Rusyd, atau mengalami dekadensi setelah invasi Mongol dan pasukan Salib, sebagaimana yang banyak dipahami dan diajarkan di dunia Barat dan oleh pemikir muslim sendiri yang terdidik pemikirannya secara Barat dan memperoleh informasi tentang filsafat Islam dari Barat. Perlu dipertegas bahwa meskipun sejarah filsafat Islam telah ditulis, namun penulisannya didominasi oleh ide bahwa abad keemasannya hanya berlangsung mulai dari al-Farabi sampai Ibn Rusyd. Sedangkan abad-abad berikutnya, dunia Islam hanya menghasilkan komentator belaka, tanpa cetusan kreatif dan orisinal, termasuk pemikiran politik Islam. Berbeda dari perspektif tersebut, filsafat Islam dianggap masih tetap eksis dalam memberikan kontribusi pemikiran yang kreatif dan orisinal. Bahwa jenis filsafat yang khas dalam filsafat Islam justru baru tumbuh dan berkembang setelah Ibn Rusyd, Mehdi Ha'iri Yazdi memasuki babak baru melalui hadirnya Mulla Shadra memberi corak yang berbeda dengan filosof sebelumnya.⁴

Polemik antara politik dan tasawuf (mistisisme Islam) telah ada dalam sejarah Islam dan merupakan bagian dari perdebatan filsafat, agama, dan politik yang lebih luas. Perbedaan pandangan antara perjumpaan politik dan tasawuf dapat mencakup

¹ Mulla Sadra, *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Fi Al-Asfar Al-'Aqliyya Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabiyyah, 1981).

² Syaifan Nur, *Filsafat Wujud Mulla Sadra*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 165-168.

³ Musa Kazim and Saleh Bagir, *Daras Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2003), h. 15.

⁴ Musa Kazim and Saleh Bagir, *Daras Filsafat Islam*, h. 11.

berbagai aspek, termasuk pandangan tentang peran individu dalam masyarakat, hubungan dengan penguasa politik, dan tujuan spiritual.

Berikut adalah beberapa poin yang juga mencerminkan polemik antara politik dan tasawuf dalam konteks Islam, Peran di dunia dihadapkan keinginan transenden: Perjumpaan politik umumnya menekankan peran aktif individu dalam dunia, termasuk dalam politik dan masyarakat. Mereka percaya bahwa sebagai warga negara Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam politik dan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Di sisi lain, tasawuf seringkali menekankan pengejaran keinginan spiritual dan pencarian kesempurnaan dalam hubungan dengan Tuhan. Ini bisa membuat beberapa tasawufis enggan terlibat dalam politik aktif karena menganggapnya dapat mengalihkan perhatian dari tujuan spiritual. Hubungan dengan Penguasa Politik: Perjumpaan politik cenderung mendukung hubungan yang lebih pragmatis dengan penguasa politik. Mereka mungkin percaya bahwa bekerja dengan pemerintah atau berpartisipasi dalam politik dapat memengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Di sisi lain, beberapa sufi mungkin mencari jarak dari penguasa politik dan berusaha untuk menjaga independensi mereka dari pemerintah.

Mereka mungkin mengkritik pemerintah yang tidak adil atau korup dan menekankan otoritas spiritual di atas otoritas politik. Tujuan Hidup: Perjumpaan politik biasanya menganggap bahwa tujuan hidup adalah menciptakan perubahan positif di dunia ini, terutama dalam konteks politik dan sosial. Mereka berpandangan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Di sisi lain, tasawuf mengarahkan perhatian pada pencapaian kedekatan dengan Tuhan dan pemahaman mendalam tentang realitas spiritual. Tujuan hidup mereka adalah mencapai kesempurnaan spiritual dan mengatasi ego, yang seringkali dipandang sebagai hambatan dalam mencapai cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Polemik ini bukanlah sebuah perdebatan mutlak antara dua pandangan. Banyak individu Islam yang mencoba menyatukan pandangan ini dengan berperan aktif dalam politik sambil tetap menjalani prinsip-prinsip spiritual tasawuf. Selain itu, pemahaman dan interpretasi masing-masing individu terhadap Islam dapat bervariasi, sehingga ada berbagai pendekatan yang berbeda dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas mereka.

Tradisi filsafat *hikmah* telah berkembang di Persia pada periode Safawi, pada periode ini kreatifitas intelektual Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat, dan menghasilkan sejumlah pemikir terkemuka dan karya-karya yang tinggi. Di antara sejumlah pemikir tersebut, tampil seorang figur yang sangat menonjol dan menempati posisi paling terkemuka, yaitu Sadr al-Din al-Syirazi (979/80-1050 H/1571/72-1640 M),⁵ yang lebih populer dengan sebutan Mulla Shadra yang menjadi fokus telaah bagi peneliti, sekaligus juga menjawab beberapa polemik terkait politik dan tasawuf yang penulis jadikan sebagai bagian dari pengantar di atas, dan di kalangan pengikut serta murid-muridnya memperoleh gelar kehormatan sebagai *Sadr al-Muta'allihin* (yang paling terkemuka di kalangan para filosof) pendiri aliran filsafat

⁵ Haidar Bagir, *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2017), h. 17.

al-Hikmah al-Muta'alliyah,⁶ Mulla Sadra telah membangun sebuah sistem pemikiran baru, menyatukan berbagai disiplin keilmuan yang berpengaruh dalam Islam seperti filsafat, kalam, tasawuf, dan ilmu-ilmu Agama. Filsafat Mulla Sadra ini menjadi bangunan raksasa dan integral dan menjadi puncak pemikiran Islam yang pernah lahir dalam sejarah khasanah pemikiran Islam, bahkan sampai hari ini.

Mulla Shadra telah berhasil melakukan sebuah sintesis besar (*grand synthesis*), yaitu *masysya'i* (Peripatetik) yang bersandar pada kekuatan rasional, Hossein Ziai menggambarkan tentang *isyraqi* (*Illuminasionis*) bersandar pada kekuatan intuisi,⁷ 'Irfani (Gnosis, sufisme, atau Tasawuf), dan *kalam* (Teologi Islam), dan menjadikan al-Quran dan hadis sebagai patron atau dalil pasti yang menjadi rujukan utama dalam membangun sistematika filsafatnya.⁸

Adapun pemikiran Mulla Shadra sebagai gambaran awal adalah kemendasaran wujud (*ashlahah alwujud*), gradasi wujud (*tashqiq alwujud*), dan gerak substansial (*harakah al-jauhariyah*), serta konsep empat perjalanan ruhani (*Asfar al-arba'ah*) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Konsep filsafat Mulla Shadra mengintegrasikan metode pemikiran peripatetik yang bercorak rasional, dan iluminasi Suhrawardi yang bercorak intuitif

Dalam filsafat Mulla Shadra agama Islam sebagai agama yang sempurna maka ajaran Islam meliputi seluruh tatanan kehidupan manusia. Hal ini sesuai firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah (5): 3, yang berbunyi:

....الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا....

Terjemahnya :

Pada hari ini telah-Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah (5): 3)⁹

Mulla Sadra telah mencairkan kebekuan yang selama ini sulit dipertemukan dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. Filsafat, Kalam, dan Tasawuf, dan juga politik menjadi satu dan tetap dibawah kontrol agama (Wahyu dan hadis), sehingga memberikan warna baru dalam wacana keIslaman. Sehingga melalui kontribusi Mulla Shadra terhadap tasawuf inilah yang patut di apresiasi bagi para akademikus Muslim dan ini pulalah yang menjadi alasan penulis menganggap penting dalam melakukan telaah terhadap sosok Mulla Shadra yang fokusnya adalah empat perjalanan ruhani (*Asfar al-Arba'ah*) terkhusus pada perjalanan ke empat yang merupakan perjalanan politik membangun tatanan dan masyarakat yang berpijak dan berorientasi Ilahi.

Konsep Empat Perjalanan Ruhani (*Asfar al-arba'ah*) Mulla Shadra

Empat perjalanan yang dimaksud dalam konsep asfar al-arba'ah Mulla Shadra adalah *pertama*, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan (Haq); *kedua*,

⁶ Kazim and Bagir, h. 14.

⁷ Hossein Ziai, Suhrawardi Dan Filsafat Iluminasi (Jakarta: Shadra Press, 2012), h. 42.

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulla Shadra: Sebuah Terobosan Dalam Filsafat Islam* (Jakarta: Shadra Press, 2017).

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 'Al-Qur'an Al -Karim', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/surah/7>>.

perjalanan di dalam [asma-asma] Tuhan bersama Tuhan; *ketiga*, perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan; *keempat*, perjalanan di dalam makhluk bersama Tuhan.¹⁰

Konsep Asfar al-Arba'ah adalah kerangka pemahaman yang menggambarkan perjalanan ruhani yang berangsur-angsur menuju Allah, Berikut adalah tafsiran konsep *Asfar al-Arba'ah*" Mulla Shadra.¹¹

Pertama, perjalanan dari Allah adalah tahap awal dalam perjalanan ruhani, di mana individu mulai mencari pengetahuan tentang Allah dan memahami hakikat eksistensi-Nya. Pada tahap ini, individu menyadari bahwa Allah adalah sumber segala keberadaan dan memulai perjalanan mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang-Nya. Ini adalah tahap kesadaran awal yang mendorong individu untuk menjalani pencarian spiritual.

Kedua, Perjalanan dalam Allah (سير في الله): Pada tahap ini, individu mulai menyadari bahwa seluruh eksistensi ada dalam Allah dan tidak ada pemisahan sejati antara ciptaan dan Sang Pencipta. Kesadaran akan Allah menjadi lebih dalam, dan individu mulai merasakan kedekatan dengan-Nya yang lebih besar. Tahap ini melibatkan pengalaman penghilangan diri, di mana individu merasa semakin tergabung dalam kesatuan dengan Allah.

Ketiga, Perjalanan kepada Allah (سير إلى الله): Pada tahap ini, individu mencapai kesadaran yang lebih dalam tentang diri mereka sebagai bagian dari Allah. Mereka menyadari bahwa semua yang ada adalah manifestasi dari Allah, dan individu mulai merasakan kembali kepada-Nya. Ini adalah tahap di mana hubungan individu dengan Allah semakin erat dan intim.

Keempat, Perjalanan di Allah (سير في الله): Ini adalah tahap tertinggi dalam perjalanan ruhani, di mana individu mencapai kesatuan absolut dengan Allah. Tidak ada lagi pemisahan atau dualitas antara individu dan Sang Pencipta. Individu hidup dalam kesadaran konstan akan Allah dan eksistensi-Nya. Tahap ini menggambarkan pencapaian puncak kesadaran spiritual, di mana individu mencapai tujuan utama perjalanan ruhani mereka.

Konsep *Asfar al-Arba'ah* Mulla Shadra menekankan pentingnya pencarian spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang Allah. Perjalanan ini tidak hanya tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga melibatkan pengalaman mistis, introspeksi, dan transformasi pribadi. Konsep ini telah berpengaruh dalam tradisi mistisisme Islam dan telah menjadi dasar pemikiran dalam filsafat dan spiritualitas Islam kontemporer.¹² Mulla Sadra menulis bahwa sifat yang tidak akhlaki menjadi penghalang manusia dalam melakukan perjalanan spritual. Menurutnya, penghalang ilusif dari dunia tidak akan dapat terbuka dari pandangan para ulama ahli lahiriyah selama belum nampak hakikat yang sesungguhnya pada mereka.

Tiga prinsip dalam pandangan ahli visi spiritual pada hakikatnya adalah sifat jiwa yang telah menjadi bagian dari dirinya, yang menyebabkan manusia

¹⁰ Sadra.

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulla Sadra: Sebuah Terobosan Dalam Filsafat Islam* (Sadra press, 2017).

¹² Muhammad Aziz, 'Mulla Shadra [1571 M-1636 M](Study Tentang Pemikiran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Dan Al-Asfar Al-Arba'ah)', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2015), 121-30.

terperangkap pada perbuatan yang tidak akhlaki. Mulla Shadra menjelaskannya sebagai berikut: Prinsip pertama adalah kejahilan terhadap pengetahuan jiwa yang merupakan hakikat manusia. Pada hakikatnya, hikmah amali (praktis) menurut Sadra adalah pengetahuan akan diri. Fondasi keimanan adalah makrifat kepada akhirat, adanya kebangkitan, realitas-realitas ruh, dan tubuh. Siapa yang tak mengetahui dirinya, tak akan mengetahui Tuhannya. Siapa tak memiliki pengetahuan terhadap diri, maka jiwanya tidaklah aktual. Hal ini karena eksistensi jiwa setara dengan kesadaran, cahaya, dan kehadiran. Prinsip kedua adalah kecintaan terhadap harta, kekuasaan, kecenderungan yang besar terhadap syahwat dan kenikmatan, serta ketergantungan jiwa kepada kebiasaan-kebiasaan hewani. Secara keseluruhan ia adalah manifestasi kecintaan dunia. Prinsip ketiga adalah kecenderungan *nafs 'ammārah* untuk menjadi lokus muslihat dan makar setan yang menampilkan keburukan seolah-olah terlihat sebagai kebaikan dan kebaikan seolah tampak sebagai keburukan. Setan memperlihatkan *kebaikan* sebagai kemungkaran dan *munkar* sebagai kebaikan (*ma'ruf*). Aktivitas setan adalah menebar perkataan buruk dan batil dan menghiasi perbuatan yang tidak saleh, lalu menunjukkan nilai kerugian dari langkah akhir mendalami pengetahuan akan jiwa dan hari akhir.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa Mulla Shadra menempatkan perjalanan ruhani keempat sebagai perjalanan politik, dimana substansi politik dimaknai sebagai upaya sadar dan rasional guna menyingkapkan realitas-realitas dan regulasi-regulasi yang mendominasi aktivitas sadar dan menggiring kehidupan kolektif manusia sekarang kepada takdir yang diinginkan.¹⁴

Pandangan ini membawa kepada kemestian regulasi bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan yang harmoni penuh dengan ketentraman, keadilan melalui otoritas Tuhan, sekaligus bahwa segala sesuatu tunduk terhadap Tuhan. Tunduk pada Tuhan berarti tunduk pada aturan-aturan dan tradisi-tradisi sunnah, termasuk keniscayaan kenabian (risalah) merupakan esensi politik Mulla Shadra. Karenanya Mulla Shadra memahami bahwa tujuan misi dari para nabi adalah sebagai perbaikan agama dan dunia manusia melalui manajemen filosofis dan politik.¹⁵

Tasawuf (*Irfan*) Mulla Shadra bersesuaian dengan watak sosial manusia, dalam perjalanan pertama yakni: perjalanan makhluk ke *al-Haqq (min al khalq ila al Haqq)*. Dalam perjalanan ruhani, manusia niscaya membutuhkan suatu kebijakan untuk memperbaiki kehidupannya, sebab manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya diikat oleh norma-norma kerja sama dan aktivitas sosial. Karenanya dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ambil bagian dalam aktivitas bersama dan kehidupan kolektif untuk tetap bertahan.¹⁶

Tasawuf pada intinya mengajak keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat, atau melakukan zikir dan doa sekaligus tetap melakukan aktifitas transformasi sosial.

¹³ Thuba Kermani and Muhammad Nur, 'Diskursus Akhlak Dalam Filsafat Mulla Sadra', *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 4.1 (2014), 78–93.

¹⁴ Imam Ibnu Malik, Ali Bowo Tjahjono, and Toha Makhsun, 'Konsep Teosofi Transendental Mulla Sadra Dan Implikasinya Dalam Praktik Pendidikan Tauhid', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.

¹⁵ H Imam Kanafi, *Filsafat Islam: Pendekatan Tema Dan Konteks* (Penerbit NEM, 2019).

¹⁶ Supratman Supratman, 'Dimensi Sosial Dalam Filsafat Mulla Sadra', *JURNAL ILMU BUDAYA*, 7.2 (2019), 310–24.

Dalam perspektif ini tasawuf dijadikan sebagai jalan bagi perubahan sosial-politik. Pada saat yang sama Said aqil Siraj juga memberi asumsi, bahwa tasawuf merupakan sebuah misi kemanusiaan yang menyempurnakan misi Islam secara holistik. Mulai dari dimensi iman, Islam hingga ihsan, di mana tasawuf menempati posisinya sebagai aktualisasi dimensi ihsan dalam Islam. Dalam praktek umat Islam sehari-hari, dimensi ihsan ini diwujudkan dalam bentuk dan pola beragama yang *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'itidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran).¹⁷

Setelah manusia dalam perjalanan sufistiknya mencapai kesempurnaan dan telah mengalami kesirnaan dalam Tuhan (*fana'*) maka perjalanan politik manusia akan dimulai. Pesuluk yang telah kembali dari perjalanan ini akan pantas memperoleh predikat khalifah Tuhan dan pemimpin masyarakat.

Konsep Politik Mulla Shadra

Politik menurut Mulla Shadra artinya bergerak dari jiwa partikular yang berdasar pada kehendak bebas manusia untuk mengatur seluruh manusia di sekitarnya dengan sistem yang sama dan memperbaiki masyarakat mereka.¹⁸

Muhsin Muhajir mengutip bahwa Mulla Shadra membagi politik menjadi dua yakni: Politik insani dan politik Ilahi. Mulla Shadra juga menyandarkan politik Ilahi kepada sekumpulan aturan yang telah diformulasikan oleh pemberi hukum suci, demi kebaikan kehidupan sosial manusia. Dia memandang nabi dan pemimpin sah setelahnya sebagai pembimbing sejati politik ini. Mulla Shadra berpendapat bahwa nabi sudah tentu menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan prinsip dan kebijakan agama. Mulla Shadra juga menyebut politik ini sebagai politik mencari keadilan, politik dari yang Maha kuasa.¹⁹

Selanjutnya Mulla Shadra menjelaskan tentang politik insani terdiri dari kebijakan-kebijakan pilihan manusia untuk kemajuan dan perbaikan masyarakat. Kemudian Mulla Shadra menjelaskan bahwa semestinya politik insani tidak terpisah dari hukum suci (*syari'ah*). berkaitan dengan falsafah imamah, Mulla Shadra mengatakan bahwa manusia niscaya bekerjasama dengan manusia yang lainnya demi kelangsungan hidup mereka, kerjasama ini menjadi sempurna dengan transaksi, dan transaksi ini harus berdasar pada sunnah dan hukum keadilan yang selanjutnya memerlukan seorang penunjuk dan legislator yang adil. Tidaklah bijak meninggalkan manusia sendiri dengan pandangan-pandangan pribadi mereka dalam masyarakat, jika tidak maka konflik akan terjadi dan mereka mungkin akan menganggap apa yang memberi manfaat kepada mereka adalah keadilan, sementara yang tidak bermanfaat adalah kezaliman. Selanjutnya Mulla Shadra mengatakan bahwa untuk mengurus perkara masyarakat yang mengarah kepada kemajuan agama dan dunia, seluruh komponen masyarakat perlu menggunakan politik dalam kehidupan mereka, sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa politik yang diinginkan oleh Mulla Shadra artinya

¹⁷ Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), h. 16.

¹⁸ M S I H Fathul Mufid and H Subaidi, *MADZHAB KEDUA FILSAFAT ISLAM: TEOSOFI ILLUMINASI (HIKMAH AL-ISYROQ) SUHRAWARDI AL-MAQTUL* (Goresan Pena, 2021).

¹⁹ Muhsin Muhajir, 'Filsafat Politik Mulla Shadra', *Mulla Shadra: Jurnal Filsafat Islam Dan Mistitsme*, Volume II.Nomor 5 (2012), 35-66.

adalah: “memimpin”, “diplomasi” dan “perbaikan” masyarakat manusia sehingga ia tidak mungkin menghadapi kekacauan dalam proses pertumbuhannya.²⁰

Politik Ilahi (*Siyāsah Ilāhī*): Politik ilahi adalah konsep yang menekankan supremasi Tuhan dalam urusan manusia dan negara. Mulla Sadra percaya bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi kebijaksanaan dan hukum moral, dan karena itu, semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik, harus tunduk pada prinsip-prinsip ilahi. Dalam politik ilahi, hukum-hukum dan peraturan diturunkan dari prinsip-prinsip agama dan etika yang ditetapkan oleh Tuhan.

Mulla Sadra meyakini bahwa pemimpin politik harus bertindak sesuai dengan ajaran agama dan hukum moral Islam. Kepemimpinan politik yang ideal adalah yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebijaksanaan ilahi. Pemimpin politik yang memerintah dengan prinsip-prinsip ini akan memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.²¹

Politik Insani (*Siyāsah Insānī*): Politik insani adalah konsep yang mengacu pada aspek-aspek manusiawi dalam politik. Mulla Sadra mengakui bahwa sementara politik ilahi menggarisbawahi kebijaksanaan Tuhan sebagai sumber prinsip-prinsip moral, manusia juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara dan politik. Politik insani mengakui peran manusia dalam menentukan nasibnya sendiri dan dalam menciptakan sistem politik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Musyawarah dan konsensus sangat penting dalam politik insani untuk mengambil keputusan politik. Dia juga memahami bahwa kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setiap masyarakat akan mempengaruhi bentuk politik yang tepat. Oleh karena itu, pemimpin politik harus memperhatikan kondisi unik masyarakat mereka dan menciptakan sistem politik yang cocok.

Mulla Sadra berusaha untuk menjembatani antara konsep politik ilahi dan politik insani. Baginya, politik yang ideal adalah yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dan etika ilahi dengan kebijaksanaan dan kebijakan manusia. Pemimpin politik yang bijaksana adalah mereka yang mengikuti ajaran agama dan moral dalam mengambil keputusan politik, sambil memahami realitas sosial dan budaya masyarakat yang mereka pimpin. Dalam pemikirannya, politik yang menggabungkan dimensi ilahi dan insani adalah yang paling ideal dan mendukung kesejahteraan manusia serta mendekatkan manusia kepada Tuhan.²²

Kebutuhan Manusia terhadap Politik dan Pemerintahan

Manusia sebagai khalifah Allah yang dari perjalanan makhluk ke Tuhan memiliki *power* untuk membuat pengaruh terhadap dunia melalui inovasi, perkembangan, dan pengendalian. Pemerintahan yang kuat dan politik yang berdaya menjadi modal pengendalian dalam menghindari kekacauan sosial, dan menjadi jalan menciptakan kehidupan yang harmoni. Manusia juga yang punya hasrat individual tentu butuh pengendalian dari luar yakni melalui pemerintahan sebagai kontrol

²⁰ Muhajir.

²¹ Andi Muhammad Ikbāl Salam and Usri Usri, ‘Pemikiran Mulla Shadra Dan Pengaruhnya Terhadap Filsafat Kontemporer’, *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7.4 (2021), 539–51.

²² M Zainal Abidin, ‘Dimensi Spiritual-Intelektual Filsafat Mulla Sadra Dan Kontekstualisasinya Bagi Kehidupan Modern’, *Millah: Journal of Religious Studies*, 2004, 159–71.

terhadap kepentingan-kepentingan individual. Salah satu tujuan dari hukum Tuhan adalah melindungi kehidupan dan tabi'at manusia serta mengamankan kehidupan sosial untuk memperoleh kesempurnaan mutlak, jalannya adalah pemerintahan dan politik sebagai sarana terbaik untuk pencapaian tujuan ini.²³

Komunitas terdiri atas dua tipe yakni: *Pertama*, Komunitas tidak sempurna yang meliputi masyarakat di dalam keluarga, gang, kecamatan dan desa; *kedua*, komunitas sempurna meliputi orang-orang yang berada di puncak pemerintahan. Adapun komunitas tipe kedua ini terdiri atas **Pemerintahan Kota** yang bekerja sama satu sama lain untuk sampai pada tujuan-tujuan mereka. Pemerintahan ini terbatas mengendalikan sejumlah kawasan pedesaan yang melakukan aturan dan disiplin internal, dan secara umum terdiri dari suatu bangsa yang terpadu. **Pemerintahan Komunitas** yang setidaknya mengendalikan tiga kota semua warga bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat; serta **Pemerintah** yang setidaknya terdiri dari tiga komunitas dan ribuan sebagian besar komunitas yang berbeda-beda dan kota-kota yang dikendalikan oleh pemerintah global dan pusat di seluruh dunia, semua komunitas bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.²⁴

Seseorang yang berada dalam perjalanan dari Tuhan menuju makhluk adalah orang yang telah berhasil melampaui seluruh tahapan kesempurnaan dan mengambil manfaat dari pancaran-pancaran yang diturunkan kaitan dengan watak, esensi, kebiasaan, serta keadaan-keadaan sukarelanya. Selain sempurna secara sains atau keilmuan juga sempurna dalam terkait hukum Ilahi dan politik keagamaan serta dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat gamblang, inilah yang menjadi syarat seseorang menjadi pemimpin politik dari sistem sosial manusia. Mulla Shadra menyebut orang tersebut sebagai pemimpin pertama, si bijak (hakim,) kekasih Allah (wali) nabi (pemberi peringatan) serta menganggap kehadirannya sebagai penting dalam mengurus dua hal yakni terkait dengan kepedulian Tuhan pada kesempurnaan manusia dalam Tuhan dan terkait dengan kebutuhan manusia pada pemimpin yang berkuasa untuk membimbingnya di dunia ini yang merupakan tempat kefasadan dan konspirasi.²⁵

Pemimpin tersebut wajib memiliki kesempurnaan yang ditandai dengan kemampuan dalam menerima pengetahuan dari intelek aktif, memiliki kemampuan dalam menjelaskan hasil dari capaian rohaninya dengan pemikiran secara fasih. Selain itu, pemimpin juga wajib memiliki kemampuan membimbing manusia dan mengarahkan manusia menuju pada kebahagiaan. Pemimpin secara fisik wajib kuat untuk mengambil bagian dalam perang melawan musuh-musuh.²⁶

Selain itu 12 kriteria sebagai khalifah di dunia yakni sehat, pemahaman yang mendalam, ingatan yang kuat, ketajaman pikiran, kekuatan bicara, cinta kebijaksanaan dan sains, pengendalian diri atas syahwat duniawi, pikiran mulia,

²³ Muhajir.

²⁴ Achmad Irwan Hamzani, 'Homo Islamicus Dan Imperfect State: Konsep Manusia Dan Al-Madinah Al-Fadilah Menurut Al-Farabi', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2019).

²⁵ Dimitri Mahayana, *PROPHETHOOD FOR TEENS: Falsafah & Risalah Kenabian Dalam Islam* (Penerbit Marja, 2019).

²⁶ Hidayatul Qoriah and Dani Nurpajar, 'Etika Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Mizan Karya Muhammad Husain Thabathaba'i', *Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research*, 1.2 (2024), 17-40.

berpaling dari daya tarik duniawi, memiliki keadilan, tegak melawan kejahatan, dan berani serta bertindak tegas dalam perbuatan.²⁷

Politik sebagai jalan praktik tasawuf telah menjadi subjek perdebatan dan refleksi dalam tradisi filsafat dan tasawuf Islam. Beberapa filosof dan sufi telah mengembangkan pandangan yang menyatukan atau menghubungkan politik dan tasawuf. Berikut adalah uraian tentang pandangan ini dari beberapa pemikir dan sufi terkenal:

Ibn Arabi seorang sufi terkenal dari Andalusia, menyajikan pandangan unik tentang hubungan antara politik dan tasawuf. Baginya, realitas yang ada adalah manifestasi dari Tuhan, dan dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat menemukan jejak-Nya. Oleh karena itu, politik, jika dijalankan dengan benar, bisa menjadi sarana untuk mencari Tuhan. Ibn Arabi berpendapat bahwa seorang pemimpin politik yang adil, bijaksana, dan bertaqwa dapat mencapai pemahaman spiritual melalui tugas-tugasnya yang melibatkan keadilan dan kebijaksanaan.²⁸

Al-Ghazali, seorang sufi dan filosof terkenal, menulis tentang hubungan antara agama dan politik dalam karyanya yang terkenal, *Ihya Ulum al-Din* (Pembaruan Ilmu-ilmu Agama). Al-Gazali menganggap politik sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial, yang menurutnya merupakan tujuan utama hukum Islam. Al-Ghazali menekankan pentingnya pemimpin politik yang bertaqwa dan beretika tinggi. Dia percaya bahwa tugas pemimpin adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, juga dikatakan bahwa politik lebih bertujuan untuk mengatur jiwa dalam mencapai manfaat dan mencegah mudarat.²⁹

Ibn Khaldun, seorang sejarawan, filosof, dan politikus, mengembangkan pemikiran politiknya dalam karyanya yang terkenal *Muqaddimah*. Meskipun dia tidak dikenal sebagai seorang sufi, konsep *asabiyah* yang dikembangkannya memiliki implikasi politik dan sosial yang relevan. Konsep ini mengacu pada semangat kelompok atau solidaritas sosial yang jika dikelola dengan baik dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil. Politik yang baik dalam pandangan Ibn Khaldun adalah yang mempromosikan *asabiyah* yang sehat untuk mencapai tujuan sosial yang baik.³⁰

Selain itu, ikhtiar Nabi Muhammad Saw. dalam membangun kota madinah sebagai praktik perjalanan ruhani keempat yang digambarkan oleh Mulla Shadra, yakni bagaimana membangun tatanan masyarakat yang berperadaban, aksentuasi nilai transeden dalam realitas sosial sebagai sarana atau wasilah dalam perjalanan menuju Tuhan. Politik sebagai perjalanan rohani yang dijalani oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan dan kepemimpinan beliau setelah hijrah (migrasi) dari Mekkah ke Madinah. Periode ini mencakup sekitar sepuluh tahun dan mencerminkan transformasi signifikan dalam cara Nabi Muhammad memimpin masyarakat Muslim.

²⁷ Muhajir.

²⁸ Mulyadhi Kartanegra, *Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 66-67.

²⁹ Imam al-Ghazali, *Mikraj Ruhani* (Irwan Kurniawan, Terjemahan) (Bandung: Marja, 2012), h. 170.

³⁰ Syed Farid Alatas, *Ibn Khaldun: Biografi Intelektual Dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2017), h. 79.

Berikut penjelasan tentang bagaimana politik menjadi perjalanan rohani dalam kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah: ³¹ *Pertama*, Migrasi ke Madinah (Hijrah) Kehidupan politik Nabi Muhammad di Madinah dimulai dengan peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan tindakan politik yang juga memiliki dimensi rohani. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah, di mana mereka mendapat perlindungan dan kebebasan untuk mempraktikkan agama Islam di Madinah.

Kedua pembentukan negara Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya datang ke Madinah sebagai seorang pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik. Di sini, beliau memainkan peran sentral dalam pembentukan Negara Madinah yang inklusif dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nabi Muhammad menegakkan konstitusi Madinah, yang mengakui hak-hak beragama dan sosial semua warga Madinah, termasuk Muslim dan non-Muslim.

Ketiga, Kepemimpinan Politik dan Moralitas Nabi Muhammad di Madinah tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga etis dan moral. Beliau menekankan pentingnya keadilan, persamaan, dan kebijaksanaan dalam pemerintahan. Tindakan politiknya selalu dipandu oleh nilai-nilai agama Islam, seperti menghormati hak-hak individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat.

Keempat, Dialog antaragama Nabi Muhammad yang sangat baik dengan berbagai kelompok agama di Madinah, termasuk Yahudi dan penganut agama Arab kafir. Beliau berusaha menjaga hubungan harmonis antara berbagai komunitas agama dalam kota tersebut, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Hubungan Sosial: Nabi Muhammad juga membangun hubungan sosial yang kuat dengan penduduk Madinah, termasuk suku-suku Arab dan suku-suku yang pindah bersamanya dari Makkah. Beliau membentuk persaudaraan antara pendatang Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah (Anshar), yang menunjukkan persatuan dan solidaritas yang kuat di antara mereka.

Kelima, Perang dan Negosiasi: Nabi Muhammad juga dihadapkan pada situasi politik dan militer yang kompleks selama masa pemerintahannya di Madinah. Beliau terlibat dalam serangkaian konflik dan perang, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud, serta perjanjian damai dan negosiasi dengan musuh-musuh Islam. Dalam semua tindakan ini, Nabi Muhammad mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam mengatasi konflik politik.

Penggabungan dimensi politik dan spiritual dalam kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah menunjukkan bahwa politik yang dijalankan dengan moralitas, keadilan, dan komitmen pada prinsip-prinsip agama dapat menjadi bagian integral dari perjalanan rohani seseorang. Beliau memberikan contoh tentang bagaimana kepemimpinan politik yang kuat dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam masyarakat.

Relasi politik dan tasawuf dalam pandangan Mulla Shadra mengutamakan peran filsafat dan dimensi rohani dalam politik. Menurutnya, politik harus dipandang dalam konteks yang lebih luas yang mencakup pemahaman mendalam tentang hakikat

³¹ Jamal Ma'mur Asmani, Tasawuf Sosial Sahal Mahfudh: Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 43.

dan eksistensi. Hal ini menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan etika dalam tindakan politik. Selanjutnya konsep politik Mulla Shadra juga melibatkan pandangan mendalam tentang manusia. Ia memandang manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki potensi untuk mencapai peningkatan moral dan intelektual. Dalam politik, ini mengarah pada ide bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan moral individu. Mulla Shadra juga sangat menekankan prinsip keadilan sosial. Baginya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan melindungi hak-hak individu. Keadilan adalah aspek penting dalam konsep politiknya. Selanjutnya Mulla Shadra juga mendukung pemerintahan yang bijak dan kompeten. Pemerintah harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, moralitas, dan kebijaksanaan yang cukup untuk memimpin dengan baik.

Konsep politik Mulla Shadra menggabungkan unsur-unsur filsafat, spiritualitas, dan keadilan sosial. Baginya, politik harus mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan manusia secara spiritual dan moral.

Pentingnya Filsafat dan Rohani: Mulla Shadra mengutamakan peran filsafat dan dimensi rohani dalam politik. Menurutnya, politik harus dipandang dalam konteks yang lebih luas yang mencakup pemahaman mendalam tentang hakikat dan eksistensi. Hal ini menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan etika dalam tindakan politik.

Pemahaman tentang Manusia: Konsep politik Mulla Shadra juga melibatkan pandangan mendalam tentang manusia. Ia memandang manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki potensi untuk mencapai peningkatan moral dan intelektual. Dalam politik, ini mengarah pada ide bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan moral individu. Keadilan Sosial: Mulla Shadra sangat menekankan prinsip keadilan sosial. Baginya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan melindungi hak-hak individu. Keadilan adalah aspek penting dalam konsep politiknya. Pemerintahan yang Bijak: Mulla Shadra mendukung pemerintahan yang bijak dan kompeten. Pemerintah harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, moralitas, dan kebijaksanaan yang cukup untuk memimpin dengan baik.

Kesimpulan

Mulla Shadra menempatkan perjalanan ruhani keempat, yakni perjalanan ‘dari’ dan dengan Tuhan menuju makhluk (*Sayr min Al-Haq Ila al khalq bi Al-Haq*) sebagai perjalanan politik, dimana substansi politik dimaknai sebagai upaya sadar dan rasional guna menyingkapkan realitas-realitas dan regulasi-regulasi yang mendominasi aktivitas sadar dan menggiring kehidupan kolektif manusia sekarang kepada takdir yang diinginkan.

Pandangan ini membawa kepada kemestian regulasi bagi masyarakat untuk melangsungkan kehidupan yang harmoni penuh dengan ketentraman, keadilan melalui otoritas Tuhan, sekaligus bahwa segala sesuatu tunduk terhadap Tuhan. Tunduk pada Tuhan berarti tunduk pada aturan-aturan dan tradisi-tradisi sunnah, termasuk keniscayaan kenabian (*risalah*) merupakan esensi politik Mulla Shadra. Karenanya Mulla Shadra memahami bahwa tujuan misi dari para nabi adalah sebagai perbaikan agama dan dunia manusia melalui manajemen filosofis dan politik.

Tasawuf (*Irfan*) Mulla Shadra bersesuaian dengan watak sosial manusia, dalam perjalanan pertama yakni: perjalanan makhluk menuju Tuhan (min al-khalq ila al-Haqq). Dalam perjalanan ruhani ini niscaya manusia membutuhkan suatu kebijakan untuk memperbaiki kehidupan sosialnya, sebab manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya di ikat oleh norma-norma kerja sama dan aktivitas sosial. Karenanya dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ambil bagian dalam aktivitas bersama dan kehidupan kolektif untuk tetap bertahan.

Shadra menggambarkan manusia sebagai khalifah Allah yang dari perjalanan makhluk ke *al-haq* memiliki power untuk membuat pengaruh terhadap dunia melalui inovasi, perkembangan, dan pengendalian. Pemerintahan yang kuat dan politik yang berdaya menjadi modal pengendalian dalam menghindari kekacauan sosial, dan menjadi jalan menciptakan kehidupan yang harmoni. Manusia juga yang punya hasrat individual tentu butuh pengendalian dari luar yakni melalui pemerintahan sebagai kontrol terhadap kepentingan-kepentingan individual.

Salah satu tujuan dari hukum Tuhan (Syari'ah) adalah melindungi kehidupan dan tabia'at manusia serta mengamankan kehidupan sosial untuk memperoleh kesempurnaan mutlak, jalannya adalah pemerintahan dan politik sebagai sarana terbaik untuk pencapaian tujuan ini.

Mulla Shadra mengatakan politik artinya bergerak dari jiwa partikular yang berdasar pada kehendak bebas manusia untuk mengatur seluruh manusia di sekitarnya dengan sistem yang sama dan memperbaiki masyarakat mereka. Mulla Shadra selanjutnya membagi politik menjadi dua yakni: Politik insani dan politik Ilahi. dia juga menyandarkan politik Ilahi kepada sekumpulan aturan yang telah diformulasikan oleh pemberi hukum Suci demi kebaikan kehidupan sosial manusia. Mulla Shadra memandang nabi dan pemimpin suci setelahnya sebagai pembimbing sejati politik. Mulla Shadra berpendapat bahwa nabi sejatinya mengatur menyangkut segala sesuatu yang terkait dengan prinsip dan kebijakan agama. Mulla Shadra juga menyebut politik ini sebagai politik mencari keadilan, politik dari yang Maha kuasa. Kemudian Mulla Shadra menjelaskan bahwa semestinya politik insani tidak terpisah dari hukum suci (syari'ah).

BIBLIOGRAFI

- Abidin, M Zainal, 'Dimensi Spiritual-Intelektual Filsafat Mulla Sadra Dan Kontekstualisasinya Bagi Kehidupan Modern', *Millah: Journal of Religious Studies*, 2004, 159–71
- Alatas, Syed Farid, *Ibn Khaldun: Biografi Intelektual Dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi* (Bandung: Mizan, 2017)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Tasawuf Sosial Sahal Mahfudh: Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019)
- Aziz, Muhammad, 'Mulla Shadra [1571 M-1636 M](Study Tentang Pemikiran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Dan Al-Asfar Al-Arba'ah)', *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2015), 121–30
- Bagir, Haidar, *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2017)
- H Fathul Mufid, M S I, and H Subaidi, *MADZHAB KEDUA FILSAFAT ISLAM: TEOSOFI ILUMINASI (HIKMAH AL-ISYROQ) SUHRAWARDI AL-MAQTUL*

- (Goresan Pena, 2021)
- Hamzani, Achmad Irwan, 'Homo Islamicus Dan Imperfect State: Konsep Manusia Dan Al-Madinah Al-Fadilah Menurut Al-Farabi', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2019)
- Ibnumalik, Imam, Ali Bowo Tjahjono, and Toha Makhsun, 'Konsep Teosofi Transendental Mulla Sadra Dan Implikasinya Dalam Praktik Pendidikan Tauhid', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*
- Imam al-Ghazali, *Mikraj Ruhani (Irwan Kurniawan, Terjemahan)* (Bandung: Marja, 2012)
- Kanafi, H Imam, *Filsafat Islam: Pendekatan Tema Dan Konteks* (Penerbit NEM, 2019)
- Kartanegra, Mulyadhi, *Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Kazim, Musa, and Saleh Bagir, *Daras Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2003)
- Kermani, Thuba, and Muhammad Nur, 'Diskursus Akhlak Dalam Filsafat Mulla Sadra', *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 4.1 (2014), 78–93
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 'Al-Qur'an Al -Karim', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/surah/7>>
- Mahayana, Dimitri, *PROPHETHOOD FOR TEENS: Falsafah & Risalah Kenabian Dalam Islam* (Penerbit Marja, 2019)
- Muhajir, Muhsin, 'Filsafat Politik Mulla Shadra', *Mulla Shadra: Jurnal Filsafat Islam Dan Mistitsme*, Volume II.Nomor 5 (2012), 35–66
- Nasr, Seyyed Hossein, *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulla Sadra: Sebuah Terobosan Dalam Filsafat Islam* (Sadra press, 2017)
- , *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulla Shadra: Sebuah Terobosan Dalam Filsafat Islam* (Jakarta: Shadra Press, 2017)
- Nur, Syaifan, *Filsafat Wujud Mulla Sadra*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Qoriah, Hidayatul, and Dani Nurpajar, 'Etika Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Mizan Karya Muhammad Husain Thabathaba'i', *Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research*, 1.2 (2024), 17–40
- Sadra, Mulla, *Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Fi Al-Asfar Al-'Aqliyya Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabiyah, 1981)
- Salam, Andi Muhammad Ikbal, and Usri Usri, 'Pemikiran Mulla Shadra Dan Pengaruhnya Terhadap Filsafat Kontemprorer', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7.4 (2021), 539–51
- Siradj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006)
- Supratman, Supratman, 'Dimensi Sosial Dalam Filsafat Mulla Sadra', *JURNAL ILMU BUDAYA*, 7.2 (2019), 310–24
- Ziai, Hossein, *Suhrawardi Dan Filsafat Iluminasi* (Jakarta: Shadra Press, 2012)